

PORNOAKSI DI PENTAS KAMPANYE PARTAI POLITIK



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRARA SATU HUKUM ISLAM DALAM ILMU HUKUM
ISLAM**

OLEH:

**Egi Pungki Pradana
NIM. 09370088**

PEMBIMBING:

**Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP. 19681020 199803 1 002**

SIYASAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVESITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Dewasa ini Praktik pornografi/pornoaksi juga tidak hanya ada muncul di media, tetapi saat ini pornografi dan pornoaksi juga telah digunakan sebagai alat untuk mendukung seorang kandidat atau partai politik meraih tujuan-tujuan politiknya melalui media kampanye. Menurut Pfau dan Parrot, kampanye merupakan suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan. Ketatnya persaingan dalam memperebutkan kekuasaan menjadikan motivasi tinggi bagi partai-partai politik dan politisi untuk melakukan berbagai cara untuk meningkatkan atau menarik simpatisan dari masyarakat guna mencapai tujuannya. Berdasarkan uraian diatas peneliti merasa tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait praktik pornografi/pornoaksi dipentas kampanye partai politik.

Jenis penelitian ini adalah model studi pustaka (*library research*), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas, yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan obyek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan penelitian ini yang akan di susun dan di kaji secara komprehensif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah Partai politik yang membutuhkan massa untuk mensosialisasikan visi dan misi tidak memiliki cara yang paling ampuh kecuali melalui kegiatan kampanye dengan mengumpulkan massa di suatu lapangan dengan menghadirkan para penyanyi dangdut yang notabene telah terkontaminasi dengan aksi-aksi goyang erotis di atas panggung. Kendati demikian, music dangdut dengan tarian erotis dianggap ampuh dan menjadi cara yang paling umum digunakan oleh politisi atau partai politik sebagai sarana untuk menghadirkan massa dengan jumlah banyak. Dampak pornografi dan pornoaksi yang paling dirasakan adalah merusak moral dan masa depan anak bangsa. Pornografi yang ditampilkan di panggung kampanye partai politik menyasar semua golongan, mulai dari lansia, orang tua, remaja, dan anak-anak. Dalam islam perbuatan pornografi dan pornoaksi memiliki hubungan dengan ketaatan seseorang terhadap agama. Di dalam tubuh terdapat di dalamnya (ruh, jiwa, akal, dan kalbu) adalah bertujuan untuk memelihara agama. Agama Islam sebagai agama terakhir dan agama yang diridhai oleh Allah yang berintikan akidah, syari'ah, dan akhlak, menuntun, membimbing, mengarahkan, dan mengatur hidup dan kehidupan manusia, baik dalam peraturan dan *qat'i* maupun *zanni*, demi kebahagiaan kita di dunia dan akhirat kelak.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Egi Pungki Pradana

NIM : 09370088

Jurusan/Prodi : Jinayah Siyasa

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 September 2015



Yang menyatakan,

Egi Pungki Pradana
NIM. 09370088



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Egi Pungki Pradana
NIM : 09370088
Judul : "Pornoaksi Di Pentas Kampanye Partai Politik"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 September 2015
Pembimbing.


Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag
NIP. 19681020 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DS/PP.00.9/0550/2015

Tugas Akhir dengan judul : PORNOAKSI DI PENTAS KAMPANYE PARTAI POLITIK
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EGI PUNGKI PRADANA

Nomor Induk Mahasiswa : 09370088

Telah diujikan pada : Senin, 05 Oktober 2015

Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima Oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji II

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19750517 200501 1 004

Yogyakarta, 05 Oktober 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Syaifuddin Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

يَبْنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِيْ سَوْءَاتِكُمْ وَرِيْشًا، وَلِبَاسُ
التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ، ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ.

“Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”. (Al-A’raaf (7):26)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat dan Ridha Allah SWT, aku persembahkan karya tulis ini untuk:

- Ibunda dan ayahanda tercinta yang telah memberikan kasih sayang, kesabaran dan pengertian yang luar biasa, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga dan tidak mungkin dapat aku balas dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan.
- Pakwo dan makwoku yang selama ini selalu memberikan nasihat selama aku menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Adindaku tercinta sebagai motivasiku, yang selalu memberikan semangat dan dorongan yang luar biasa kepadaku.
- Almamaterku tercinta Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya jurusan Siyasah untuk semua ilmu, didikan, dan pengalaman yang sangat berarti yang telah diberikan kepadaku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji bagi Allah, kepada-Nya kita meminta pertolongan atas urusan-urusan duniawi dan agama, teriring doa serta keselamatan semoga tercurah atas Rasul yang termulia, , ialah nabi kita Muhammad dan keluarganya, para sahabat dan para tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat.

Beribu syukur saya panjatkan atas rahmat dan petunjuk yang telah Allah berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongannya, terutama dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul: “pornoaksi di pentas kampanye partai politik” yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun. Adapun penyusunan skripsi ini yaitu untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana S1 Hukum Islam Dalam Ilmu Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya, penyusun sadari skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada:

1. Prof. Dr. Machasin. M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. M. Nur, M.Ag. selaku Ketua Prodi Siyasah dan Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Sekretaris Prodi Siyasah.
4. Dr. Ocktoberriyah, M.Ag. selaku pembimbing, yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penyusun guna mencapai kebaikan maksimal dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Prodi Siyasah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama kuliah.
6. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan dan kesabaran demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Ayahanda dan ibunda tercinta, yang senantiasa mengiringi penyusun dengan doa, harapan, nasihat, serta curahan kasih sayang.
8. Adikku tercinta Eko Arnando dan Estermeilita terima kasih atas doa, dan dorongannya.
9. Untuk seseorang yang sangat spesial dalam hidupku. Trima kasih atas doa, motivasi, dan dorongannya selama ini.

10. Teman-teman kost an 106. Terima kasih untuk semangat, kekompakan, dan kebersamaan kita.

11. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat.

Penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 20 September 2015

Penyusun,



Egi pungki pradana
NIM. 09370088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II: TINJAUAN UMUM TENNTANG KAMPANYE PARTAI POLITIK.....	19
A. Pengertian Kampanye.....	19
B. Jenis-Jenis Kampanye.....	22
1. Jenis Kampanye.....	22

2. Kampanye Sebagai Alat Pemasaran Politik.....	24
3. Tujuan Kampanye.....	25
4. Sasaran Kampanye.....	26
5. Kampanye Dalam Kacamata Islam.....	27
C. Marketing Politik.....	30
D. Strategi Kampanye.....	39
E. Etika Kampanye Partai Politik.....	42
1. Etika Dalam Islam.....	42
2. Etika Kampanye Dalam Islam.....	48
BAB III: PORNOAKSI DALAM KAMPANYE	54
A. Pengertian Pornoaksi.....	54
B. Definisi Pornoaksi Menurut Para Ahli.....	58
C. Realitasi Pornoaksi Di Pentas Panggung Politik.....	66
BAB IV: ISLAM DAN ETIKA POLITIK.....	76
A. Politik Islam Berlandaskan Ahklak.....	76
B. Pornoaksi Dan Moral Bangsa.....	86
C. Analisis Pornoaksi sebagai Strategi dalam Kampanye Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam.....	92
BAB V: PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran-Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	es (dengan titikdiatas)
ج	Jim	I	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titikdi bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titikdiatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titikdi bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titikdi bawah)

ط	Ta'	ṭ	te (dengan titikdi bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titikdi bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalikdiatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	em
ن	Nun	'n	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	aposrof
ي	Ya'	Y	ye

II. KonsonanRangkapkarena SyaddahDitulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutahdi Akhir Kata

a. Biladimatikan/sukunkanditulis "h"

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Biladiikuti dengan kata sandang'al' serta bacaan keduaituterpisah, maka ditulish

كرامة الولىاء	Ditulis	<i>Karāmahal-aulyā</i>
---------------	---------	------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah dituliskan

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zākah al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati		Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah diikuti Wawu Mati		Ditulis	<i>au</i>
	قول		Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Biladiikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Biladiikuti huruf *Syamsiyah*ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah*yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l'(el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-katadalamRangkaianKalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawilfurūdataual-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahlussunnahatauahlas-sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena pornoaksi dewasa ini telah mencapai perkembangan yang sangat pesat, sudah menyentuh setiap lapisan masyarakat tanpa terhalang oleh sekat-sekat geografis lagi. Bahkan masyarakat pedesaan yang secara geografis jauh dari kota, di mana diasumsikan sebagai sentra pornoaksi, pun tak luput terjamah. pornoaksi adalah perbuatan, sikap, perilaku, gerakan tubuh ataupun suara yang erotis dan sensual, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, secara perseorangan atau berkelompok. Meski tidak sepenuhnya disebabkan oleh media massa, namun suguhan berita serta tayangan yang mengusung tema seksualitas berikut derivasinya secara tak langsung telah memantik imajinasi publik tentang pornografi dan pornoaksi. Belum lagi internet di mana situs-situs porno begitu gampang diakses tanpa filter yang ketat jelas menjadi media efektif bagi mewabahnya pornografi dan pornoaksi.

Menurut sebuah penelitian, di seluruh dunia ada sekitar 26.000 situs porno. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah, dengan 1.500 situs porno baru setiap bulannya. Situs porno lokal saja tidak kurang dari 1100 buah. Dus, buku, gambar, dan VCD porno juga tak sulit ditemukan.

Dengan kepublikan arus pornografi dan pornoaksi tersebut, siapa yang mampu menjamin masyarakat di berbagai lapisan takkan tenggelam dalam

pusaran terkutuk itu. Akhirnya, disadari atau tidak, masyarakat pun melakukan hal yang mengarah ke bentuk pornoaksi. Karena itulah bisa dimengerti kenapa angka pemerkosaan terus meningkat belakangan ini. Setidaknya berita pemerkosaan yang terus saja berulang di berbagai daerah dengan beragam motifnya makin menguatkan sinyalemen itu. Pada kisaran satu dasawarsa silam saja, di Indonesia rata-rata terjadi 5 sampai 6 wanita diperkosa setiap harinya.¹ Tak tertutup kemungkinan data ini bertambah secara drastis dewasa ini.

Praktik pornoaksi juga tidak hanya ada muncul di media, tetapi saat ini pornoaksi juga telah digunakan sebagai alat untuk mendukung seorang kandidat atau partai politik meraih tujuan-tujuan politiknya melalui media kampanye. Menurut Pfau dan Parrot, kampanye merupakan suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan.² Ketatnya persaingan dalam memperebutkan kekuasaan menjadikan motivasi tinggi bagi partai-partai politik dan politisi untuk melakukan berbagai cara untuk meningkatkan atau menarik simpatisan dari masyarakat guna mencapai tujuannya.

Di samping mencari teori baru yang ingin diterapkan dalam setrategi berpolitiknya, juga berusaha mencari solusi yang dianggap efektif untuk mengalahkan seteru ataupun lawan politiknya. Termasuk metode yang

¹ *Koran Republika*, 29/5/1994.

² Toni Andrianus Pito, Dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik Dari System Politik Sampai Korupsi*. Cet Ke-3 (Bandung.: Nuansa Cendekia, 2013), hlm. 187

dilakukan adalah kampanye dengan mengadakan pentas dangdut di lapangan terbuka sekaligus dengan para penyanyinya yang pakaiannya hanya menutup bagian-bagian tertentu dari tubuhnya saja (pornografi) baik itu dalam pertunjukan secara langsung maupun lewat media masa, cetak dan elektronik.

Sesungguhnya dalam ajaran agama manapun terlebih lagi di Indonesia yang merupakan penduduknya mayoritas memeluk agama Islam, dan merupakan pemeluk agama Islam terbesar di Dunia hal tersebut sangat ditentang, sebab hal tersebut menyangkut masalah etiaka. Di dalam agama manapun etika merupakan hal yang sangat fundamental untuk dijaga dan dipertahankan sekalipun dalam keadaan darurat. Jika hal ini terus dibiarkan dan tetap diterapkan oleh setiap partai politik dan dipertontonkan baik itu diberbagai media maupun dipertontonkan secara langsung di muka umum maka itu bertentangan dengan undang-undang tentang partai politik, Undang-undang tentang pornografi dan bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri serta akan menimbulkan banyak efek negatif.

Seharusnya setiap partai politik dalam menarik simpatisan tidak harus dengan cara mengadakan pesta dangdut dengan para biduan atau penyanyi yang menggunakan pakaian yang kurang layak untuk di pertontonkan. Sebenarnya metode tersebut tidak ada yang salah jika diterapkan ditempat yang seharusnya atau dinegara budayanya relevan untuk menerapkan metode tersebut. Akan tetapi, dalam konteks ke-Indonesiaan sudah dianggap tidak etis. Mengingat, negara indonesia adalah penganut agama islam terbanyak dunia dan menimbulkan banyak konsekuensi buruk terhadap anak bangsa terutama

kalangan remaja serta kurang baik juga bagi dunia perpolitikan di Indonesia itu sendiri.

Oleh karena itu, problem tersebut tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja untuk mencari solusinya, akan tetapi menjadi tugas kita bersama, termasuk bagi pemerintah untuk lebih menanamkan nilai-nilai etika dalam pembuatan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan UU tentang partai politik itu sendiri. Selain pemerintah, kalangan akademisi juga masih diharapkan untuk banyak berkontribusi dalam menyikapi masalah ini, dan juga lembaga keagamaan.

Untuk mencari data tersebut, menjadi rasionalisasi bagi penulis untuk menjadikan sebuah penelitian yang berbentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul, "PORNOAKSI DI PENTAS KAMPANYE PARTAI POLTIK", akan tetapi penulis tidak membahas terlalu jauh, hanya saja penulis memberikan batasan-batasan yang dianggap urgen, membuat batasan tersebut, maka penulis akan menspesifikkan kajian ini melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan dimuat nantinya dalam perumusan masalah.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, supaya kajian dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan mengambang, maka diperlukan adanya pembatasan yang konkret, demi tercapainya kajian yang bersifat empiris, sistematis, dan spesifik. Oleh karena itu, untuk mencapai spesikasi

pembahasan tersebut, maka penulis akan menguraikan permasalahan-permasalahan yang berbentuk pertanyaan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pornoaksi di dalam kampanye partai politik?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pornoaksi dalam kampanye partai politik?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peranan pornografi dan pornoaksi di dalam kampanye partai politik.
- b. Untuk mengetahui tinjauan pornoaksi dalam kampanye partai politik dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan keterampilan peneliti, khususnya mengenai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pornoaksi di dalam kampanye partai politik.
- 2) Dapat memberikan solusi alternatif dan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan moralitas bangsa dan negara Indonesia.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi ilmu pendidikan terutama mengenai pornografi didalam pentas kampanye partai politik itu sendiri.
- 2) Memberikan manfaat bagi kalangan akademisi serta dapat menjadi referensi bagi praktisi yang memerlukan untuk masa mendatang.

D. Telaah Pustaka

Mengutip karya orang lain tanpa seizin dari pemiliknya merupakan pelanggaran tindak pidana jika tidak disertai dengan sumber referensinya. Dengan tegas dan penuh tanggungjawab, skripsi ini murni karya dari penulis sendiri dan tidak ada sedikitpun manipulatif, kecuali ada sebagian kutipan yang di adopsi oleh penulis sebagai faktor penguat (landasan teori) dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis membuktikan bahwa judul penelitian ini mulai dari penamaan judul dan alur pembahasan belum pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Di bawah ini penulis mencantumkan karya-karya ilmiah yang dianggap mirip dengan penelitian ini, baik berupa buku, disertasi, tesis, skripsi, jurnal, dan sebagainya, yaitu sebagai berikut:

Skripsi karya saudara Joko Santoso, dalam skripsinya *Strategi Politik Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2009 Di D.I. Yogyakarta Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, skripsi ini membahas tentang strategi PKS untuk meraih target suara yang besar ialah melakukan segmen pemilih (tidak hanya memilih kalangan tertentu), tetapi seluruh lapisan masyarakat (*kaffatan*

linnas), tanpa membedakan usia, gender, pendidikan, profesi, etnis, budaya daerah, bahkan agama (mulai pluralis) dan membidik (fokus) sasaran suarapada segmen pemilih yang terbesar masyarakat.³

Skripsi karya Rohmat Budi Sanjoyo, dalam skripsinya *Pornografi Tinjauan Etika Islam (Telaah Terhadap Nilai-Nilai Etika Islam Dalam Fatwa MUI Tahun 2001 Tentang Pornografi)*, dalam skripsi ini saudara Rohmat Budi Sanjoyo lebih menekankan pokok bahasannya tentang apa definisi dari pornografi, bagaimana fatwa MUI berbicara tentang pornografi dan tantang bagaimana kedudukan pornografi dalam tinjauan etika Islam.⁴

Skripsi karya saudari Irmawanti, dalam skripsinya yang berjudul, *Strategi Humas Dalam Upaya Meraih Simpatisan Bagi Pasangan Prakoso (Studi Kasus Kampanye DPD Partai Golkar Pada Pilkada Bupati Kulonprogo 2011)*, dalam skripsinya saudari Irmawanti menitik beratkan bahasannya terhadap bagaiman implementasi dari strategi humas DPD partai golkar dalam upaya memperoleh simpatisan bagi pasangan prakoso (Drs. Suprpto-Drs. H. Soim, MM) pada pilkada bupati kulonprogo tahun 2011.⁵

Skripsi karya Salaim Athari, dalam skripsinya *Kriteria Pornografi Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, dalam

³ Joko Santoso, *Strategi Politik Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2009 Di D.I. Yogyakarta Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2010)

⁴ Rohmat Budi Sanjoyo, *Pornografi Tinjauan Etika Islam (Telaah Terhadap Nilai-Nilai Etika Islam Dalam Fatwa MUI Tahun 2001 Tentang Pornografi)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2006)

⁵ Irmawanti, *Strategi Humas Dalam Upaya Meraih Simpatisan Bagi Pasangan Prakoso (Studi Kasus Kampanye DPD Partai Golkar Pada Pilkada Bupati Kulonprogo 2011)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2012)

pemaparannya saudara Salim Athari lebih menekankan penelitiannya terhadap apa kriteria pornografi dalam perspektif hukum pidana islam, kemudian yang ke dua beliau menekankan kepada apa akibat hukum pornografi dalam perspektif hukum pidana Islam.⁶

Skripsi karya Muhammad Syariful Mar'I, dalam skripsinya *Ponografi Menurut UU Pornograafi Dan Fatwa MUI*, beliau membahas dan menitik beratkan terhadap apa definisi pornografi menurut fatwa MUI dan kemudian apa definisi pornografi menurut UU pornografi.⁷

Oleh karena itu, berdasarkan analisis di atas yang menunjukkan hasil bahwa ternyata tidak ada satupun penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dengan penelitian yang diangkat peneliti, baik pada posisi subyek maupun obyeknya. Selain itu, belum pernah ada juga peneliti sebelumnya yang meneliti tema dengan subyek dan obyek yang sama dengan yang dilakukan peneliti. Sehingga dengan ini, skripsi yang berjudul "PORNOAKSI DI PENTAS KAMPANYE PARTAI POLITIK" bisa dinilai layak untuk dikaji lebih lanjut dan untuk dijadikan sebagai objek penelitian skripsi ini.

E. Kerangka Teoritik

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili

⁶ Salaim Athari, *Kriteria Pornografi Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2006)

⁷ Muhammad Syariful Mar'I, *Ponografi Menurut UU Pornograafi Dan Fatwa MUI*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2011)

kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara abash (*legitimate*) dan damai. Partai politik dalam pengertian modern dapat di definisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.

Menurut Mark N. Hagopian, partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung ataupun partisipasi rakyat dalam pemilihan. Berdasarkan batasan-batasan tersebut, tampak jelas bahwa basis sosiologis dari suatu partai adalah ideologi dan kepentingan yang diarahkan pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan.⁸

Guna meraih kemenangan dalam event pemilihan umum partai politik menggunakan berbagai strategi yang terangkum dalam strategi kampanye. Kampanye pemilu adalah bagian dari demokrasi. Meskipun kritik terhadap partai yang disampaikan melalui karikatur sering memberikan kesan tidak baik, tetapi kampanye pemilu tidak dapat dianggap sebagai tidak legitim ataupun tidak bermoral. Kampanye pemilu merupakan instrumen yang sah dimana kelompok kepentingan politik berupaya menjelaskan kebenaran

⁸Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Cet Ke-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012), hlm. ii

tujuannya kepada masyarakat umum. Kampanye mendapatkan legitimasi dari arti pemilu itu sendiri, karena pemilu adalah fondasi kebebasan individu.

Pemilu adalah instrument pembentukan kehendak masyarakat yang didasarkan pada proses hukum. Pemilu akan merangkum pendapat dan menentukan kriteria pengambilan keputusan untuk semua keputusan politik untuk Negara. Hal ini khusus pemilu yang membentuk pemerintahan. Demokrasi berbeda dengan bentuk pemerintahan apapun juga, seperti yang disebut pakar politik *Wilhem Henning*, karena dalam demokrasi, rakyat dapat menghentikan pemerintahan yang tidak disukai dengan cara sama sekali tidak berdarah. Dengan pandangan lebih jauh, metaphor “militer” mengartikan pemilu adalah “pertempuran”. Tetapi pertempuran yang dimaksud hanyalah merupakan pertarungan kata-kata untuk menyampaikan isi dan juga untuk mencapai tujuan. Penentuan menang atau kalah akan terjadi pada saat pemilu. Menurut Arnold Steinberg, kampanye politik modern adalah cara yang digunakan oleh para warga negara dalam demokrasi untuk menentukan siapa siapa yang akan memerintah mereka.⁹

Paisley mengatakan bahwa kampanye merupakan bentuk komunikasi kepada publik secara lebih terkontrol baik isi pesan maupun bentuk kegiatannya. Dia memberi definisi kampanye komunikasi publik sebagai: “*someone’s to influence someone else’s beliefs or behavior, using communicated appeals*”. Kampanye merupakan strategi control sosial dalam

⁹ Toni Andrianus Pito, Dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik Dari System Politik Sampai Korupsi*, Cet Ke-3, (Bandung: Nuansa Cendekia 2013), hlm. 185-186

rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan pada saatnya menuruti apa yang diprogramkan oleh partai politik.

Salah satu bentuk kampanye yang dilakukan oleh kontestan untuk menggalang dukungan dan mengumpulkan orang dalam satu ruangan atau tempat yaitu dengan mendatangkan para public figure, seperti artis dan atau tokoh masyarakat lainnya. Ketika mendatangkan artis ke panggung-panggung hiburan di sela-sela kampanye, seringkali artis-artis pengisi acara menampilkan ekspresi porno.

Di Indonesia, definisi pornografi masih menjadi kontroversi masyarakat, ini disebabkan belum adanya regulasi atau pengaturan secara hukum positif yang menerangkan secara eksplisit wilayah-wilayah pornografi. Dalam Undang-undang pornografi ketentuan umum pasal 1 pasal 1 dijelaskan bahwa, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Didalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang di sediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel,

televisi, telepon, radio, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah dan barang cetakan lainnya.¹⁰

Namun, pornografi dari bahasa Yunani berarti penampakan atau penggambaran wanita pelacur. Karena tingkah laku pelacur ini dikonotasikan sebagai perilaku untuk membangkitkan nafsu birahi, maka pengertian pornografi dalam perkembangannya dalam bahasa Indonesia adalah penggambaran tingkah laku yang membangkitkan nafsu birahi.¹¹

Selain pornografi ada istilah lain yaitu pornoaksi. Istilah tentang pornografi mungkin sudah umum ditelinga kita, akan tetapi di Indonesia muncul kemudian istilah populer yang dikembangkan oleh MUI sejak fatwa No: U-287 tahun 2001 yang mengatur pelarangan terhadap praktik pornografi dan pornoaksi. Kemudian masyarakat membuat kategori-kategori khusus tentang pornografi dan pornoaksi. Ada yang mengimplikasikan bahwa pornoaksi termasuk bagian pornografi, ada juga yang secara tegas membedakan keduanya. Ada hal pokok yang membedakan antara materi pornografi dan pornoaksi. *Striptis (Striptease)* misalnya, adalah pertunjukan tarian yang dilakukan oleh perempuan dengan gerakan antara lain menanggalkan pakaiannya satu persatu dihadapan penonton, atau dapat juga berarti tarian telanjang.

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia No 44 tahun 2008, Pasal 1. Cet. 2, (Surabaya: Kesindo Utama. 2011), hlm. 2

¹¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 611.

Dalam pandangan Djubaedah, *strepttease* dapat dikategorikan sebagai 'pornoaksi'. Akibat dari aksi telanjang ini dengan pornografi sebenarnya tidak jauh berbeda, baik ditampilkan langsung maupun melalui media komunikasi, yaitu sama—sama menimbulkan nafsu birahi bagi orang yang menontonnya atau melihatnya. Menurutnya, jika *striptis* itu dilakukan secara langsung tanpa media komunikasi saat ini di sebut dengan *pornoaksi*. Sedangkan apabila *striptis* itu dilakukan di media komunikasi maka dapat dikategorikan sebagai *pornografi*.¹²

Dengan demikian, pengertian pornoaksi dari sebagian besar yang dideskripsikan, lebih dekat pada konotasi gerak-gerik tubuh yang erotis (yang membirahikan atau menimbulkan rangsangan seksual). Batasan pornoaksi dalam penelitian ini adalah sikap, perilaku, perbuatan, gerakan tubuh, suara yang erotis dan sensual baik dilakukan secara tunggal ataupun bersama - sama, atau dilakukan antara manusia dan hewan, atau antara hewan yang sengaja dipertontonkan oleh seorang atau lebih yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu birahi orang, baik perbuatan pornoaksi yang dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, lesbian, oral-sex, fellatio, cunnilingus, onani, masturbasi, anal intercourse (sodomi), baik dilakukan oleh seorang sejenis kelamin maupun berlawanan jenis kelamin, yang ditunjukkan atau mengakibatkan orang yang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau

¹² Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoraksi; Ditinjau Dari Hukum Islam*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 138. Dan Alex A. Rachim, *Pornografi dalam Perssebuah Orientasi* (Jakarta: dewan pers, 1997), hlm. 10-11

menyentuhnya timbul rasa yang menjijikan dan atau memuakkan dan atau memalukan, yang bertentangan dengan agama dan atau adat istiadat setempat.

Pornoaksi sebagai materi kampanye bertentangan dengan hukum Islam. Islam mengajarkan bahwa anggota badan (tubuh) harus dijaga dari hal-hal yang dapat mendatangkan nafsu birahi. Tubuh sebagai amanat Allah harus dipelihara oleh setiap manusia karena merupakan bentuk pemeliharaan agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Oleh karena itu pornografi dan pornoaksi merupakan sikap menentang kelima hal tersebut karena dapat mengakibatkan pemerkosaan dan perzinaan, bahkan pembunuhan.

Oleh karena itu, dalam Islam, di dalam kampanye sekalipun untuk kebaikan harus dilakukan dengan cara-cara yang baik pula. Etika dalam islam mengajarkan bahwa cara yang baik tidak bias ditempuh dengan cara-cara yang kotor atau cara-cara yang bertentangan dengan Islam. Dengan demikian metode kampanye dengan menampilkan kepornoan untuk menggalang dukungan adalah bertentangan dan bukan merupakan etika Islam.

F. Metodologi Penelitian

Agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu pisau analisis (*teori*) tertentu. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah model studi pustaka (*library research*), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas, yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan obyek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan penelitian ini yang akan di susun dan di kaji secara komprehensif.

b. Pendekatan Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data skunder , terutama bahan-bahan primer dan bahan-bahan sekunder.

2. Subyek penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber data yang diperoleh didalam penelitian.Maka yang menjadi subyek penelitian adalah tindakan politik yang di lakukan oleh partai politik.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang peneliti peroleh melalui penelitian dilapangan yang dilakukan dengan observasi dilapangan dan wawancara dengan pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data normatif atau yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan. Untuk mendapatkan data sekunder maka peneliti menggunakan metode penelitian normatif. Dengan metode sosiologis:

1) Bahan Primer, dalam bentuk:

- a) Undang-Undang RI no. 44 tahun 2008 tentang pornografi
- b) Kitab Undang-undang Hukum pidana
- c) Undang-Undang tentang partai politik
- d) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003

2) Bahan Sekunder

Bahan yang dapat menunjang bahan primer dan dapat membantu penelitian dalam menganalisa dan memahami bahan premier terkait pornografi dipentas kampanye partai politik, seperti: literature, atau hasil penyusunan yang berupa hasil

penelitian, peraturan perUndang-Undangan, buku-buku, makalah, majalah, artikel dan lain-lain.

3) Bahan Tersier

Yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kamus Hukum dan lain-lain yang menunjang bahan premier dan bahan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu: Dalam mencari bahan pustaka, peneliti perlu untuk mengetahui seluk-beluk perpustakaan sebagai tempat terhimpunnya data sekunder. Pengetahuan tentang seluk-beluk perpustakaan dalam membantu peneliti untuk menghemat waktu, tenaga, maupun biaya,¹³ maka dipenelitian ini peneliti melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan yang diperlukan, seperti bahan premier, bahan sekunder, dan bahan tersier yang terkait tentang pornografi dipentas kampanye partai politik.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibacadan diinterpretasikan. Penyusunan dengan metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Seluruh

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 41

data yang diperoleh diolah dengan menggunakan metode deduktif untuk menganalisis tentang pornografi dipentas kampanye partai politik.

G. Sistematika Pembahasan

Seluruh pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun rincian pembahasannya sebagai berikut: Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas subbab-subbab latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab *dua* tinjau tinjauan umum tentang kampanye partai politik. Pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian kampanye, jenis-jenis kampanye, kampanye sebagai alat pemasaran politik, strategi kampanye, tujuan kampanye, sasaran kampanye, kampanye dalam kacamata Islam.

Bab *ketiga* membahas tentang pornoaksi dalam kampanye. Pada bagian ini dibahas mengenai pengertian pornoaksi, pandangan ahli mengenai pornoaksi dan pornoaksi di pengas panggung politik di Indonesia.

Bab *empat*, merupakan pembahasan yaitu Islam dan etika politik. Pada bagian ini dibahas mengenai politik Islam berlandaskan Akhlak dan pornoaksi dan moral bangsa.

Bab *kelima* penutup, membahas tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan penelitian di atas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk pornoaksi yang ditampilkan oleh para kontestan pemilu yaitu dengan menampilkan atau mempertontonkan anggota tubuh yang sensitive di atas panggung hiburan music dangdut maupun hiburan yang lain. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dalam kampanye pada pemilu legislative maupun pilpres. Dangdut yang bernuansa pornoaksi telah menjadi kultur atau budaya masyarakat Indonesia yang telah mengakar. Partai politik yang membutuhkan massa untuk mensosialisasikan visi dan misi tidak memiliki cara yang paling ampuh kecuali melalui kegiatan kampanye dengan mengumpulkan massa di suatu lapangan dengan menghadirkan para penyanyi dangdut yang notabene telah terkontaminasi dengan aksi-aksi goyang erotis di atas panggung. Kendati demikian, music dangdut dengan tarian erotis dianggap ampuh dan menjadi cara yang paling umum digunakan oleh politisi atau partai politik sebagai sarana untuk menghadirkan massa dengan jumlah banyak.

2. Menurut pandangan Islam, perbuatan pornoaksi memiliki hubungan dengan ketaatan seseorang terhadap agama. Di dalam tubuh terdapat di dalamnya (ruh, jiwa, akal, dan kalbu) adalah bertujuan untuk memelihara agama. Agama Islam sebagai agama terakhir dan agama yang diridhai oleh Allah yang berintikan akidah, syari'ah, dan akhlak, menuntun, membimbing, mengarahkan, dan mengatur hidup dan kehidupan manusia, baik dalam peraturan dan *qat'i* maupun *zanni*, demi kebahagiaan kita di dunia dan akhirat kelak. Agama Islam yang di dalamnya terdapat hukum Islam, baik dalam pengertian *syari'ah* maupun *fiqh*, mengatur hubungan kita dengan Tuhan (*ibadah mahdah*, atau yang disebut juga *hablun minanallah*), yang tercermin dalam *arkanul -Islam*, juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, baik local, nasional, maupun internasional, serta mengatur hubungan manusia dengan alam sekitarnya (*hablun-minan-nas*). Dampak pornoaksi yang paling dirasakan adalah merusak moral dan masa depan anak bangsa. Pornoaksi yang ditampilkan di panggung kampanye partai politik menasar semua golongan, mulai dari lansia, orang tua, remaja, dan anak-anak. Panggung hiburan kampanye tidak melakukan seleksi bagi siapa yang pantas dan tidak pantas untuk menyaksikan tarian erotis yang ditampilkan oleh para penyanyi dangdut dalam kegiatan-kegiatan kampanye parpol. Oleh karena itu, kegiatan kampanye dengan menghadirkan nuansa pornoaksi sangat membahayakan bagi moral dan masa depan anak Indonesia secara umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kampanye merupakan sarana untuk menyampaikan visi misi dan tujuan seorang kandidat atau partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan Negara. Oleh karena itu, maka sepantasnya harus dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan menurut Islam.
2. Bagi partai politik, kampanye merupakan sarana pendidikan politik bagi warga Negara. Oleh karena itu, maka harus dilakukan dengan menjadikan pendidikan politik sebagai basis di dalam aktifitas politiknya, termasuk dalam mengadakan kegiatan kampanye atau panggung hiburan.
3. Bagi peneliti lain, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan karena dilakukan hanya menggunakan data pustaka. Peneliti lain hendaknya melakukan penelitian lain dengan memperdalam pendapat-pendapat actual dan dalam mengenai pendapat tokoh dan masyarakat secara umum terhadap aktifitas kampanye yang menghadirkan materi pornoaksi, serta mengukur dampak dari kegiatan tersebut terhadap moral masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

Undan-undang Republik Indonesia No 44 tahun 2008

Buku:

Abdullah, Irwan, 2006, *Kontruksi Dan Reproduksi Kebudayaan*, cet ke-1, Yoyakarta: Pustaka Pelajar.

Alex A. Rachim, 1997, *Pornografi dalam pers, sebuah orientasi*, Jakarta: Dewan Pers.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, 1986, *Fiqih Wanita*, Terj. Anshori Umar (Semarang: Asy-syifa.

Amal, Ichlasul, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Cet Ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana

Amin, Ahmad, 1991, *Etika (Ilmu Ahlak)*, Jakarta: Bulan Bindant

Andrianus Pito, Toni, Dkk, 2013, *Mengenal Teori-Teori Politik Dari System Politik Sampai Korupsi*. Cet Ke-3, Bandung: Nuansa Cendekia.

Armada, Wina, 1989, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Jakarta: Pustaka Kartini.

Atmadi, 2001, *Bunga Rampai (Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia)*, Jakarta: Pantja Simpati.

- Bungin, Burhan, 2003, *Pornomedia Konstruksi Teknologi Telematika dan Peryaan Seks Di Media Massa*, Jakarta: Prenada Media.
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Daulay, Hamdan, 2001, *Dakwah Di Tengah Persoalan Budaya Dan Politik*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: LESFI (Lembaga Studi Filsafat Islam).
- Denial, Akhmad, 2009, *Iklan Politik TV (Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru)*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang.
- Djubaedah S, Neng, 2003, *Pornografi Dan Pornoraksi; Ditinjau Dari Hukum Islam*, Cet ke-1, Jakarta: Kencana.
- Hadi, Ny. Sutimijah, 1960, *Tentang Delik-delik Pers*, Surabaya: CV Jawa Timur Press,
- Haris, Abd, 2010, *Etika Hamka, Konstruksi Etikberbasis Regional Religious*, cet ke-1, Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang.
- L.J. Van Apeldoorn, 1976, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Khoirul Anwar, Dkk, 2006, *Perilaku Partai Politik (Studi Prilaku Partai Politik Dalam Kampanye Dan Kecenderungan Pemilih Pada Pemilu 2004)*. Cet Ke-1, Malang: UMM Press.
- Miskawaih, 1994, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, Bandung: Mizan.

Sa'bah, 2001, *Perilaku seks menyimpang dan seksualitas kontemporer umat islam*, Yogyakarta: UII Press.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Penelitian Hukum Normative (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers,

Subhi, 2001, *Mabahis fi Ulum Al-Qur'an*, Jakarta: Dinamika Barakah Utama.

Syukur, Amin, 2002, *Zuhud di Abad Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Venus, Antar, 2012, *Manajemen Kampanye (Panduan Teoretis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Wirawan, Suwono Sarlito, *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lain-lain:

“ironis-di-lokasi-kampanye-anak-anak-disuguhi-adekan-erotis.html”,

<http://www.merdeka.com/pemilu-2014/ironis-di-lokasi-kampanye-anak-anak-disuguhi-adekan-erotis.html>, diakses pada 12 September 2015 pukul 01.00 WIB

“Kampanye Ala Pornoaksi Parpol Demokrasi Rusak Masa Depan Anak”,

<http://shoutussalam.co/2014/03/kampanye-ala-pornoaksi-parpol-demokrasi-rusak-masa-depan-anak/>, diakses pada 12 September 2015 pukul 01.00 WIB

Asmaul Husna, <http://www.waspada.co.id>, diakses pada 12 September 2015 pukul

01.00 WIB

Athari, Salaim, *Kriteria Pornografi Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Budi Sanjoyo, Rohmat, 2006, *Pornografi Tinjauan Etika Islam (Telaah Terhadap Nilai-Nilai Etika Islam Dalam Fatwa MUI Tahun 2001 Tentang Pornografi)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 3, Jakarta: Balai Pustaka

Dharma wanita persatuan, 2002, *Arti Pornografi dan pornoaksi dalam* <http://www.dwp.or.id/article.php?id=111>, diakses pada 12 September 2015 pukul 01.00 WIB

Etika Kampanye Dalam Islam, <http://myquran.or.id/forum/archive/index.php/t-23829.html>, di akses pada 31 agustus 2007 pukul 11: 32

Evie Sofia Inayati, “Permasalahan Masyarakat dan Kegemaran Terhadap Pornografi : Kajian Pustaka, *Tarjih* Edisi 5 Januari 2003.

Fatwa Majelis Ulam Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang *Pornografi dan Pornoaksi*, Tanggal 22 Agustus 2001/3 Jumadil Akhir 1422 H

Hasil Diskusi Organisasi Pengarang Indonesia (OPI) tahun 1956, “*Apakah Bacaan Cabul?*”.

Irmawanti, 2012, *Strategi Humas Dalam Upaya Meraih Simpatisan Bagi Pasangan Prakoso (Studi Kasus Kampanye DPD Partai Golkar Pada Pilkada Bupati Kulonprogo 2011)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

M. Sofyan Pulungan, <http://www.kapanlagi.com>, diakses pada 12 September 2015 pukul 01.00 WIB.

Maria Ulfa Anshor, <http://www.kompas.com>, diakses pada 12 September 2015 pukul 01.00 WIB

Redana, <http://www.kompas.com>, diakses pada 12 September 2015 pukul 01.00 WIB

Rizal Mustanyir, “Refleksi Filosofis atas Pornografi dan Pornoaksi,” *Tarjih*, Edisi 5 Januari 2003.

Santoso, Joko, 2010, *Strategi Politik Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2009 Di D.I. Yogyakarta Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Syariful Mar’I, Muhammad, 2011, *Ponografi Menurut UU Pornograafi Dan Fatwa MUI*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Trisno Yulianto dan Ari Krisnawati, “Pornografi dan Perempuan Media” dalam
<http://www.dwp.or.id/article.php?id=111>, diakses pada 12 September
2015 pukul 01.00 WIB



LAMPIRAN:



Curriculum Vitae

Nama : Egi Pungki Pradana

Alamat : Desa Pakhda Suka, Kecamatan BPR Ranau Tengah,
Kabupaten Oku Selatan, Prov Sumatera Selatan

TTL : Tanjung Sari, 15 September 1990

No. HP : 085643703073

Email : egipungkipradana@yahoo.co.id

Pendidikan

SD : SD Negeri 01 Tanjung Sari

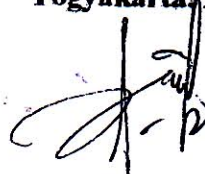
SMP : MTS Negeri 01 Banding Agung

SMA : MA Negeri 01 Banding Agung

S1 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga D. I Yogyakarta

Organisasi : Pramuka
IKPM Oku Selatan Komiseriat Serasan Seandanan,
Yogyakarta.

Yogyakarta, 28 september 2015



Egi pungki pradana